

Idzam Fautanu

Idzam Fautanu

Partai Politik di Indonesia



Partai Politik di Indonesia



Prodi S2 Studi Agama-Agama
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung



Prodi S2 Studi Agama-Agama
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ISBN 978-623-95343-3-2



9 786239 534332



Prodi S2 Studi Agama-Agama
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

IDZAM FAUTANU

Partai Politik di Indonesia



Prodi S2 Studi Agama-Agama
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Bandung
2020

Partai Politik di Indonesia

Penulis:

Idzam Fautanu

ISBN: 978-623-95343-3-2

ISBN 978-623-95343-3-2



Editor:

M. Taufiq Rahman

M. F. Zaky Mubarok

Desain Sampul dan Tata Letak:

Paelani Setia

Penerbit:

Prodi S2 Studi Agama-Agama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:

Ged. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Soekarno Hatta Cimincrang Gedebage Bandung 40292

Telepon : 022-7802276

Fax : 022-7802276

E-mail : s2saa@uinsgd.ac.id

Website : www.pps.uinsgd.ac.id/saas2

Cetakan pertama, November 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi yang dengan kuasanya buku ini telah rampung diselesaikan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan pada mahasiswa tentang partai-partai yang ada di Indonesia. Untuk tujuan tersebut pembahasan mengenai perkembangan partai-partai pada masa Kolonial dan Orde Lama adalah pembahasan yang pertama dan kedua. Kemudian buku ini pun menggali perkembangan partai politik Indonesia pada masa Orde Baru. Perkembangan partai politik pada Era Reformasi, baik awal Reformasi maupun masa terakhir yang bersifat pemilihan langsung adalah pembahasan yang terakhir. Akhir sekali adalah pembahasan tentang kemungkinan-kemungkinan partai politik di masa depan.

Untuk buku ini, yang pertama-tama mesti diberikan ucapan terima kasih adalah Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. yang telah memberikan arahan dan support untuk penerbitan karya kami. Begitu juga terimakasih kami sampaikan kepada Direktur Pascasarjana, UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag. atas dukungan dan saran-saran dalam penerbitan modul ini. Ucapan terimakasih pun kami sampaikan

kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung, Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, MA. atas penjadwalan saya dalam bidang ilmu politik. Akhirnya, kami harus berterimakasih kepada pihak Prodi Magister SAA atas bantuannya menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. Terimakasih.

Bandung, 25 November 2020

Idzam Fautanu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
1. Pendahuluan	1
2. Partai Politik Masa Kolonialisme.....	4
3. Partai Politik Masa Orde Lama.....	14
4. Partai Politik Masa Orde Baru.....	58
5. Partai Politik Masa Pasca Reformasi.....	95
6. Partai Politik Masa Demokrasi Pemilihan Langsung.....	108
7. Penutup.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	147
TENTANG PENULIS.....	155

I. PENDAHULUAN

Mempelajari sejarah partai politik di Indonesia juga berarti mempelajari budaya demokrasi yang ada di negeri ini, termasuk bagaimana masing-masing partai politik mendorong persaingan ideologi dan gagasan pembangunan. Pasalnya, parpol-parpol ini memiliki garis ideologis yang berbeda di Indonesia, dari agama hingga nasionalis. Dan itu ada sejak organisasi modern dibawakan oleh Belanda di kepulauan ini sejak sebelum kemerdekaan. Sebagai bangsa yang belajar memodernisasi diri Indonesia kemudian masuk ke dunia organisasi modern. Maka muncullah Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan lain-lain. Demikian juga sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh mereka yang terdidik oleh Barat.

Dalam perjalanannya, organisasi-organisasi modern itu kemudian menjadi tempat menyuarakan aspirasi masyarakat. Maka organisasi-organisasi politik pun muncul. Ada Syarikat Islam yang berideologikan Islam, ada pula Syarikat Rakyat yang berideologikan komunisme yang sebetulnya muncul dari Syarikat Islam itu sendiri. Syarikat Islam pada perjalanannya menjadi partai politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sedangkan Syarikat Rakyat menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang

sebelumnya berwujud perkumpulan saja, yaitu Indische Sociaal Democratiche Vereniging (ISDV).

Di masa kemerdekaan, polarisasi itu menguat karena Indonesia masa itu mengambil jalan demokrasi liberal, sehingga pada tahun 1955, sebagai pemilihan umum (pemilu) pertama, banyak sekali partai yang ikut terlibat (30an partai lebih). Namun pemilu tersebut menyaksikan empat pemenang yang terpolarisasi dari dua madzhab besar politik sebelum kemerdekaan. Keempatnya adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PNI dan PKI tampaknya berasal dari ideologi yang dibawa oleh Syarikat Rakyat; dan Masyumi dan NU melanjutkan ideologi yang dibawa oleh Syarikat Islam.

Polarisasi partai politik di Indonesia semakin rumit ketika memasuki pemilu kedua, yaitu pada tahun 1971; di mana ketika itu Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto, atau apa yang disebut dengan Orde Baru. Namun karena riwayat pemenang dapat dilihat pada tahun 1955 bahwa ada empat pola partai, maka pada tahun 1971 situasi politik mengarahkan Indonesia pada 9 kontestan pemilu saja dengan dimenangkan oleh Golkar. Selanjutnya sejak pemilu 1977 hingga berakhirnya pemilu Orde Baru tahun 1997, Indonesia hanya punya 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Polarisasi klasik ala Syarikat Islam dan Syarikat Rakyat tampak, tetapi ditengahi oleh Golkar yang merupakan *single majority*. Selama masa Orde Baru ini kampanye anti-kiri dan anti-kanan terus-menerus dikumandangkan.

Setelah Soeharto mundur, Indonesia kembali menyaksikan bermunculannya berbagai partai yang merupakan wadah aspirasi rakyat. Namun pemilu 1999 hanya bisa menyaksikan 5 pemenang mayoritas dari 48 kontestan pemilu. Dari lima itu, dua adalah pendatang baru, yaitu PKB dan PAN. Ketiga lainnya masih warisan Orde Baru, yaitu PDI-P, Golkar, dan PPP. Polarisasi klasik ala Orde Lama muncul lagi, yaitu adanya PKB sebagai representasi NU, dan PAN sebagai representasi Masyumi. Pada masa berikutnya,

Masyumi baru muncul dengan kekuatan tua dari PBB dan kekuatan muda dari PK/PKS.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini unik dan mempunyai tradisi yang cukup mengakar, yaitu kaum santri dan kaum abangan. Kaum santri mewakili tradisi Islam dan kaum abangan mewakili tradisi sekuler. Diantara keduanya selalu ada yang menengahi, berusaha mengatasi, dan berusaha pluralis. Tetapi ujung-ujungnya selalu ada polarisasi seperti tadi, kaum yang mengutamakan Islam dan kaum sekular.

Apapun kejadian dan tradisinya, sebagai bangsa yang memodernisasi diri Indonesia selalu menunjukkan itikadnya sebagai bangsa yang demokrasi. Oleh karena itu segala perubahan haluan politik selalu diwadahi oleh hukum-hukum yang mengawali dan menyertainya. Di sinilah maka kita dapat melihat kembali dengan kajian sejarah hkum, bahwa untuk urusan politiknya, terutama politik kepartaian, Indonesia selalu menyediakan payung hukumnya, sehingga Negara Hukum (*Rechstaat*) itu menjadi kenyataan.

VII. PENUTUP

Dengan melihat perkembangan partai politik di Indonesia di bab-bab sebelumnya, di sini dapat dinyatakan kembali bahwa bangsa Indonesia dalam perilaku politiknya telah menganut sistem Negara Hukum (Rechstaat). Apapun yang terjadi pada ranah politik dan sosial, bangsa Indonesia tetap berdasarkan pada hukum.

Kecenderungan pada haluan kanan dan kiri adalah hal yang lumrah dalam situasi perpolitikan bangsa Indonesia. Namun tampaknya yang selalu menang adalah yang berada di tengah. Walaupun demikian tengah bukan berarti sepi dari kritik. Justru ketika di tengah itulah muncul kritik dari kanan dan kiri. Oleh karenanya ketika di tengah yang melihat itu justru dari bawah, karena yang di tengah itu posisinya menjadi di atas. Apapun halnya kita bisa lihat dari perjalanan sejarah politik kepartaian di Indonesia.

Dinamika ideologis itu pun dapat dilihat pada perkembangan terbaru politik kepartaian di Indonesia, yaitu Pasca Reformasi. Selama dua puluh tahunan demokrasi Indonesia Pasca Reformasi, Indonesia melihat banyaknya partai yang lebih bersifat pragmatis. Banyak pengamat berpendapat bahwa partai-partai Indonesia

hanya memiliki sedikit perbedaan dalam masalah kebijakan dan ideologi. Satu-satunya perbedaan yang jelas di antara mereka adalah sejauh mana mereka percaya Islam harus memainkan peran dalam urusan publik.

Para ahli telah mencapai kesimpulan ini sebagian besar dengan melihat bagaimana partai-partai tersebut berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Perbedaan ideologis antara partai-partai Islam dan non-Islam tidak terkait dengan perbedaan program di bidang-bidang utama seperti kebijakan fiskal dan sosial. Politik Indonesia tampaknya didominasi oleh “kartel” partai yang ditandai oleh keinginan bersama untuk berbagi rampasan jabatan, bukan oleh diferensiasi ideologis atau kebijakan. Akibatnya, partai-partai berkeinginan untuk membentuk “koalisi pelangi” yang sangat luas dan heterogen yang terdiri dari partai-partai Islam dan non-Islam.

Namun ada hal yang harus diperhatikan juga bahwa animo masyarakat terhadap partai politik juga dapat menurun dengan hal itu. Politik bukan lagi berisi ideologi seperti yang dulu-dulu. Politik tampak hanya sebagai tempat orang mencari kerja. Saat ini partai politik - walaupun sangat penting untuk sistem demokrasi yang kuat - menjadi spesies yang terancam punah.

Demikian karena pada politik itu mainannya adalah keinginan dan harapan. Maka, walaupun kehidupan orang membaik, itu tidak berarti bahwa orang-orang itu puas secara politik. Dan menjadi jelas bahwa kemajuan ekonomi dan kemakmuran tidak selalu membeli stabilitas politik. Oleh karena itu partai politik sebagai representasi keinginan politik harus selalu peka terhadap harapan masyarakat.

Gelombang kebencian pada partai politik pun bias juga dipicu oleh ketidaksabaran yang baru ditemukan terhadap korupsi. Dalam dekade terakhir, masyarakat di mana korupsi dulu diperlakukan sebagai fakta kehidupan mengembangkan intoleransi yang kuat terhadap pencurian resmi dan menggulingkan politisi yang tadinya tidak tersentuh.

Memang di Indonesia, seringkali yang berkuasa juga adalah pemimpin partai politik tradisional. Ketika para pemimpin seperti itu kedapatan mencuri, itu menjadi noda lain di partai-partai, yang prestise dan daya pikatnya terus memudar. Hari-hari ini, partai politik dilihat bukan sebagai habitat alami bagi kaum idealis, tetapi tempat yang nyaman untuk oportunis dan pencari karier yang suka bicara dan sering munafik.

Di sisi lain, demokrasi, bagaimanapun, tetap membutuhkan partai politik. Kita membutuhkan organisasi permanen yang mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan politik, yang dipaksa untuk mengartikulasikan kepentingan dan sudut pandang yang berbeda, yang dapat merekrut dan mengembangkan pemimpin pemerintahan di masa depan dan yang memantau mereka yang sudah berkuasa.

Para pemimpin politik perlu memiliki pendirian tentang pendidikan dan senjata nuklir, perawatan kesehatan dan pertanian, dan memiliki pandangan yang diartikulasikan dengan baik tentang memerangi terorisme dan mengatur bank, di antara banyak masalah kebijakan lainnya. Dan partai politik adalah kamp pelatihan para pemimpin ini.

Untuk bertahan hidup, partai politik harus mendapatkan kembali kemampuan untuk menginspirasi dan memobilisasi orang - terutama kaum muda - yang mungkin meremehkan politik atau lebih suka menyalurkan energi politik apa pun yang mereka miliki melalui kelompok-kelompok non-politis. Para pihak harus bersedia merombak struktur, pola pikir, dan metode mereka untuk beradaptasi dengan dunia baru. Kita juga perlu membawa pembaruan partai ke latar depan dalam setiap diskusi politik kontemporer. Agar negeri ini tetap menjadi negeri yang demokrasiya terkonsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005., h. 44.
- Ahmad, T. A. (2015). Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang 1917-1920. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 8(2).
- Ahmad, Z. M. (2013). *SIKAP POLITIK SOEKARNO TERHADAP PARTAI MASYUMI 1957-1960* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Akbar, A. (2013). *Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934*. Marjin Kiri.
- Asshiddiqie, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. *Jurnal*, 6.
- Azed, Abdul Bari, and Makmur Amir. (2006). *Pemilu dan partai politik di Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Bachtiar, T. A. (2018). *Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad Ke-20 dan Awal Abad Ke-21*. JSP Publishing.

- Bakri, S. (2015). *Gerakan Komunisme Islam Surakarta 1914-1942*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Bubalo, A., & Fealy, G. (2007). *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan Pustaka.
- Eko Handoyo, (2014). *Pemilu Untuk Pemula (Jilid 1): Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, 2014. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku pemilih menjelang Pemilu 2019. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40-48.
- Fealy, G. (2012). *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967* (Vol. 1). LKIS PELANGI AKSARA.
- Federspiel, H. M. (2009). *Persatuan Islam: Islamic reform in twentieth century Indonesia*. Equinox Publishing.
- Frederick, W. H. (1991). Takashi Shiraishi. *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*. (Asia East by South.) Ithaca: Cornell University Press. 1990. Pp. xxi, 365. \$34.95.
- Ghazali, Z., Riama, E., & Said, Y. (1998). *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Haidar, M. A. (1994). *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasrul, Muh. "Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah." *Amanna Gappa* 27.1 (2019): 23-28.
- <https://kpud-medankota.go.id/pemilu-1955/> Diakses Hari Senin, 23 November 2020.
- Huda, N. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Kencana.
- Ibrahim, Harmaily. (1981). *Pemilihan umum di Indonesia (himpunan pemikiran dari tahun 1973 sampai tahun 1981)*. Sinar Bakti.

- Indarja. (2018). Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari, h. 63-70.
- Joko J. Prihatmoko, (2005). *Pemilihan kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Jurdi, S. (2016). *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*. Kencana.
- Kahin, G. M. (2003). *Nationalism and revolution in Indonesia* (No. 35). SEAP Publications.
- Karianga, D. H., & SH, M. (2015). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana.
- Katz, Richard S. (2007). *A theory of parties and electoral systems*. JHU Press.
- Kepartaian Indonesia (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, TP: TT).
- Khuluk, L. (2000). *Fajar Kebangunan Ulama; Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Kristiadi, J. (1998): "Sistem Pemilu: Proporsional, Distrik atau Campuran." *makalah disampaikan pada Dialog Nasional tentang" Agenda Pemilu: Visi, Tantangan dan Prospek"*, Depok.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Latif, Y. (2013). *Negara paripurna*. Gramedia Pustaka Utama.
- Lijphart, Arend. (2012). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Lisda Syamsumardian, (2016). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dengan Sistem Noken Di Papua*, Jakarta: Universitas Pancasila.

- Luth, T. (1999). *M. Natsir, dakwah dan pemikirannya*. Gema Insani.
- Maarif, Ahmad Syafii. (1985). *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES.
- Duverger, Maurice. (1967). *Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State*, London: Methuen.
- McKay, David. (2017). *American politics and society*. John Wiley & Sons.
- Michels, Robert, and Alvin Gouldner. (1993). "The Iron Law of Oligarchy." 111-24.
- Miriam Budiardjo. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Mulawarman, A. D. (2020). *Jang Oetama: Jejak dan Perjuangan HOS Tjokroaminoto*. Penerbit Peneleh.
- Nasution, A. B. (1992). *The aspiration for constitutional government in Indonesia: A socio-legal study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ni'matul Huda, (2009). *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2009.
- Niel, R. V. (1984). *Munculnya Elit Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noor M Azis, (2011). *Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Nopyandri, Nopyandri. (2013). "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dalam perspektif UUD 1945." *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum* 6.7.
- Notodijoyo, S. I. (1985). *Harsono Tjokroaminoto: mengikuti jejak perjuangan sang ayah*. Gunung Agung.

- Noviati, Cora Elly. (2016). "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10.2: 333-354.
- Poeze, H. A. (2011). *Madiun 1948: PKI Bergerak*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetyoningsih, Nanik. (2014). "Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia." *Media Hukum* 21.2: 23.
- Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 072/PUU-II/2004, Pengujian terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Rahman, Agus R. (2002). "Krisis Ekonomi 1997 yang Berkepanjangan: Strategi Penyelesaian Ekonomi dan Politiknya." dalam Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim. Ed. *Amandemen Konstitusi & Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*. Jakarta: AIPI-PGRI.
- Ramdhon, A. (2016). *Merayakan Negara Mematrikan Tradisi: Narasi Perubahan Kampung-Kota di Surakarta*. Pandiva Buku.
- Respationo, HM Soerya. (2013). "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral." *Masalah-Masalah Hukum* 42.3: 356-361.
- Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Penerbit Serambi.
- Romadhon, A. D. (2015). *Tentara Kanjeng Nabi Muhammad: Studi Kasus Tentang Reaksi Terhadap Pemikiran "Aliran Islam Jawa" Tahun 1916-1919 M* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Rozali Abdullah. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 53-54.

- Sanit, A. (1992). *Golput: aneka pandangan fenomena politik*. Pustaka Sinar Harapan.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Saraswati, Retno. (2012). "Desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif." *Masalah-Masalah Hukum* 41.1: 137-143.
- Sardini, Nur Hidayat. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press.
- Schumpeter, Joseph A. (2013). *Capitalism, socialism and democracy*. Routledge.
- Sholeh, M. A. *Performa Komunikasi Syarikat Islam Dalam Citra Islam Sosialisme Pasca Reformasi* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Simon, János. (2003). "The Change of function of political parties at the turn of millenium."
- Sodikin, Sodikin. (2014). "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3.1: 19-31.
- Stroomberg, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. IRCiSoD.
- Subekti, V. S. (2014). *Partai Syarikat Islam Indonesia: Konstestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sudono Syueb. (2008). *Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah sejak kemerdekaan sampai Era Reformasi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sugiyama, A. (2011). Remembering and Forgetting Indonesia's Madiun Affair: Personal Narratives, Political Transitions, and Historiography, 1948–2008. *Indonesia*, (92), 19-41.

- Suharijal, (2011). *Pemilukada, Regulasi, dinamika dan Konsep mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, A. (2020). The Sarekat Islam in Surakarta (1912–1915). In *International University Symposium on Humanities and Arts (INUSHARTS 2019)* (pp. 190-193). Atlantis Press.
- Surbakti, A. R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasaan sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Partnership for Governance Reform Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. "Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT." Gramedia Widiasarana Indonesia (1992).
- Syahrul Mustofa, S. H. (2019). *Demokrasi, Korupsi dan Pembubaran Partai Politik*. GUEPEDIA.
- Thalib, A. R., & SH, M. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Citra Aditya Bakti.
- Thoha, M. (2017). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Prenada Media.
- Tichelman, F. (1992). Takashi Shiraishi. An Age in Motion. Popular Radicalism in Java, 1912–1926. [Asia East by South.] Cornell University Press, Ithaca [etc.] 1990. xxiv, 365 pp. \$34.95. *International Review of Social History*, 37(3), 410-413.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 BAB 1 Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Van Bruinessen, M. (1994). *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. LKIS PELANGI AKSARA.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.

Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69-81.